



Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
Daftar Tabel	x
Daftar singkatan.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan penelitian	13
1.4. Manfaat penelitian.....	13
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Ekonomi Politik Kebijakan Publik.....	14
2.2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	16
2.3. Dinamika Hubungan antar aktor kebijakan pertambangan pasir merapi	19
2.4. Teori Konflik	24
2.5. Analisis ekonomi politik aktor pertambangan pasir merapi.....	27
2.6. Kerangka Pikir Penelitian	32
BAB III Metode Penelitian	33
3.1. Jenis dan pendekatan penelitian	33
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.3. Sumber Data	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data	35
3.5. Teknik analisis data	37
BAB IV Deskripsi Obyek Penelitian.....	39
4.1. Profil pertambangan pasir di Kabupaten Magelang	39
4.2. Aktor yang terkait dengan pertambangan pasir.....	41
4.3. Latar belakang munculnya Perbub	46
BAB V Dinamika Konflik Penambangan Pasir di Kabupaten Magelang	52
5.1. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi	52
5.1.1 Kronologi peristiwa pelanggaran dalam Pertambangan Pasir.....	52
5.1.2 Modus penambang alat berat	58

5.2.1	Pengajuan Izin penambang manual “Punokawan” tahun 2011	68
5.2.2.	Pengajuan Izin Penambang manual “Punokawan” tahun 2012	70
5.2.3.	Pengajuan Penambang manual “Punokawan” tahun 2014.....	73
5.3.	Penegakan hukum.....	86
5.3.1.	Kendala-Kendala instansi pemerintahan Kabupaten Magelang.....	88
5.3.2.	Ketidaksinkronan Peraturan Pertambangan Pasir di Kabupaten Magelang..	95
BAB VI Analisis Konflik Pertambangan Pasir di Kabupaten Merapi		100
6.1.	Pemetaan konflik antar aktor	100
6.1.1	Konflik Penambang manual “Punokawan” versus Penambang modern	102
6.1.1.1.	Penyebab munculnya konflik antara penambang manual dan penambang modern	102
6.1.1.2.	Power/Kekuasaan aktor	108
6.1.2	Konflik penambang manual “Punokawan” versus Pemerintah Kabupaten Magelang.....	116
6.1.2.1	Kepentingan dan persepsi penambang manual “Punokawan”	116
6.1.2.2.	Persepsi pemerintah kabupaten magelang.	117
6.1.3.	Konflik aktor lainnya	119
6.2.	Analisis factor penyebab konflik.....	121
6.2.1.	Peraturan kebijakan pertambangan	122
6.2.2.	Implementasi kebijakan pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.....	125
6.2.3.	Lemahnya Penegakan hukum	127
6.2.4.	Kecurigaan praktik “dibalik meja”	128
6.3.	Efek konflik.....	130
BAB VII Penutup		132
7.1.	Kesimpulan.....	132
7.2.	Saran	135
Daftar Pustaka.....		137

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Daftar perusahaan pemilik SIPD	4
Tabel 1. 2 Kerugian atau biaya langsung yang dibayar oleh Pemkab Magelang dikawasan pertambangan pasir merapi di kawasaan merapi selama november 1998-oktober 2000	5
Gambar 2. 1 Proses Implementasi.....	18
Gambar 2. 2 Bagan Interaksi antar aktor dalam proses implementasi (Kiviniemi 1986:252)22	
Gambar 2. 3 Bagan Kerangka pikir Penelitian	32
Tabel 3. 1 Tabel daftar informan beserta data yang telah didapat	36
Gambar 4. 1 Peta Aliran Sungai Utama di Wilayah Gunung Merapi.....	39
Tabel 4. 1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang dari Retribusi Pajak Penambangan Pasir, 2001-2005	40
Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang di Sektor bahan galian golongan C tahun 2011-2013.	40
Gambar 5. 1 Peta Rekapitulasi korban, pengungsi dan masyarakat akibat letusan Gunung Merapi.....	46
Tabel 5. 1 Volume Endapan Piroklastik yang Berpotensi Menjadi Lahar Akibat Erupsi Merapi 2010.....	48
Tabel 5. 2 Keuntungan Lahar Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010.....	49
Gambar 5. 2 Bagan Prosedur Perizinan	74
Tabel 5. 3 Operasi penertiban Penambangan alat berat	87
Tabel 5. 4 Upaya penertiban Sat Pol PP Kabupaten Magelang	91
Gambar 5. 3 Bagan alur pertambangan pasir di kabupaten Magelang.....	97
Gambar 6. 1 Peta konflik dalam pertambangan pasir di Kabupaten Magelang.....	101
Gambar 6. 2 Pohon konflik pertambangan pasir Kabupaten Magelang	121

Daftar Singkatan

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
BBWSSO	: Balai Besar Wilayah Serayu Opak
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPKKD	: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah
BPPT	: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Gemasika	: Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Kebijakan Publik
IUP-EP	: Izin Usaha Pertambangan Explorasi Produksi
IUP-OP	: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Organisasi GORO	: Organisasi Gotong Royong (organisasi yang mewadahi penambang pasir di Merapi)
P4N UGM	: Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Peta WP	: Peta Wilayah Pertambangan
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Rekomtek	: Rekomendasi Teknis
SIPD	: Surat Izin Pertambangan Daerah
SIPR	: Surat Izin Pertambangan Rakyat
SIUP	: Surat Izin Usaha Pertambangan
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WPR	: Wilayah Pertambangan Rakyat